

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan satu dari banyak negara yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja. Masalah yang dimaksud adalah masalah mengenai tingginya jumlah pengangguran, dimana diketahui pengangguran merupakan masalah yang menghambat proses pembangunan. Masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang sangat luas dan kompleks serta berkaitan dengan kesempatan kerja. Dengan tersedianya kesempatan kerja, maka masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Maka dari itu, dalam proses pembangunan ekonomi, negara dituntut agar mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja.

Persoalan pada ketenagakerjaan selalu berkaitan dengan kesempatan kerja, karena hal tersebut menjadi salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan tersedianya kesempatan kerja tersebut, maka masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, dalam proses pembangunan ekonomi, negara dituntut agar mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja.

Dilihat dari keadaan pasar tenaga kerja yang ada di Indonesia selalu mengalami perkembangan. Pada tahun 2016 diketahui jumlah penduduk Indonesia sekitar 261,1 juta jiwa, diantaranya 125,4 juta jiwa tergabung dalam angkatan kerja. Sedangkan jumlah lapangan

pekerjaan baru tahun 2015 sekitar 2.886.288 juta, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sekitar 2.448.915 juta, serta mengalami kenaikan pada tahun 2017 sekitar 2.669.469 juta jiwa. (Putri & Soelistyo, 2018)

Di Indonesia yang masih menjadi masalah utama adalah masalah kesempatan kerja. Masalah ini muncul dikarenakan adanya kesenjangan dalam mendapatkannya. Ketenagakerjaan adalah aspek yang penting untuk kehidupan manusia karena di dalamnya terdapat dimensi sosial serta ekonomi. Ada kecenderungan apabila pendapatan masyarakat perkapita semakin naik akan menyebabkan perubahan struktur ekonomi yang semakin cepat. Pembangunan ekonomi merupakan tahapan yang mempunyai tujuan untuk menaikkan standar kehidupan masyarakat, kesempatan kerja menjadi luas, serta pembagian pendapatan yang terarah secara merata. Di negara berkembang seperti Indonesia pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan meratakan pembangunan ekonomi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, serta menyeimbangkan struktur ekonomi yang ada. Di negara yang sedang berkembang khususnya di negara Indonesia yang sedang menjadi masalah utama adalah meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun dengan pesat yang mengakibatkan timbulnya masalah tersendiri. Ditambah lagi belum berfungsinya semua sektor dengan maksimal dan pembangunan ekonomi yang belum merata di semua bidang mengakibatkan lapangan kerja yang tersedia belum cukup memenuhi kebutuhan. (Warapsari dkk, 2020)

Dalam konteks daerah di Provinsi Sumatera Utara masalah penyerapan tenaga kerja pun menjadi masalah yang serius. Terbaru ini, Gubernur Sumatera Utara, bapak Eddy Rahmayadi bahkan meminta bantuan APJATI untuk membantu proses kesejahteraan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara. Dalam berita yang dibagikan dalam lama kemendagri.go.id (diakses 08/12/2021 pukul 14:20 WIB) Gubernur Eddy Rahmayadi menuturkan bahwa :

“... pengelolaan tenaga kerja di Sumatera Utara masih perlu perbaikan diantaranya sistem pengupahan. "Saya melihat perlu perbaikan dalam pengelolaan tenaga kerja di Sumut, misalnya upah minimum. Saya lihat sebenarnya tahun 2021 turun sampai 2,8%. Kita mau buat bagaimana ada standar upah yang baik. Stimulus apa yang bisa kita berikan untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi dari sektor tenaga kerja. Kita juga harus memperhatikan pengusaha, agar keduanya bisa nyaman," ucap Edy Rahmayadi, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagian ...”

Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara juga tidak kalah lincah dengan gerak langkah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mencoba menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Jika mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pemerintah daerah yang bertugas mengurangi pengangguran adalah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan sebagai unsur pelaksana tugas teknis, dan otonomi daerah dari pusat maupun daerah dengan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya serta Dinas Tenaga Kerja merupakan Lembaga pemerintah daerah yang dominan dalam mengatasi pengangguran di Kota Medan. Namun, walaupun instansi tersebut telah ada sejak lama namun masalah ketenagakerjaan masih menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh Pemerintah Kota Medan.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita dan laju pembangunan ekonomi ditujukan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) untuk tingkat nasional dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk tingkat regional. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat.

Perhitungan PDRB didasarkan pada empat sektor kegiatan ekonomi yaitu Konsumsi (C), Investasi (I), Pemerintah (G) dan Ekspor-Import (E-M). Keempat kegiatan sektor ekonomi ini sangat berpengaruh kepada pembangunan suatu negara atau daerah, dan peningkatan pendapatan

masyarakat satu negara atau daerah. Nilai PDRB inilah yang akan menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan daerah tersebut.

Dalam pertumbuhan ekonomi juga memerlukan unsur investasi. Investasi sebagai salah satu faktor produksi merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kapasitas produksi ataupun jumlah industri. Peningkatan investasi ini sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap hasil produksi baik permintaan dari dalam negeri. Permintaan tersebut merupakan pasar dan hal ini berpengaruh pada jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi. (Dharma & Djohan, 2015)

Dengan banyaknya sektor-sektor industri di Kota Medan seharusnya dapat menjadi potensi yang sangat baik yang dapat dikelola agar Kota Medan menjadi kota yang sejahtera. Namun, pada kenyataannya warga kota Medan masih jauh dari kesejahteraan, banyaknya pengangguran menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja masih sangat kurang karena terbatasnya lapangan pekerjaan.

Dinamika investasi sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Perlu adanya terobosan baru untuk lebih menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor baik asing maupun domestik dan meningkatkan daya saing ekspor melalui keberpihakan atas dasar regulasi dan kebijakan pemerintah yang tepat serta di atasinya berbagai permasalahan yang masih melekat selama ini seperti : kendala infrastruktur, perizinan, peraturan daerah, perpajakan dan ketimpangan wilayah.

Disamping dalam penyediaan lapangan pekerjaan, memperbaiki tingkat upah juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kota Medan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 7 tahun 2013 upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh

gubernur. Upah ini wajib dijadikan acuan oleh pengusaha dan pelaku industri sebagai standar minimum dalam memberi upah pekerjanya.

Upah merupakan salah satu indikator penting dalam hubungannya dengan kesempatan kerja. Di Indonesia terdapat dua macam upah minimum yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk satu provinsi, sedangkan UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diberikan kepada pekerja dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan UMP. UMK ditetapkan berdasarkan perhitungan yang didasarkan pada kebutuhan hidup minimum (KHM) sedangkan UMP ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan berpedoman pada literatur yang ada yaitu beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja yang dihadapkan dengan investasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum di kota Medan. Untuk itu penulis mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul: **“ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), INVESTASI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Medan?
2. Apakah ada pengaruh upah minimum kota terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Medan?

3. Apakah ada pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Medan.
2. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kota terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Medan.
3. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masukan kepada pemerintah, dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam penyerapan tenaga kerja, PDRB, investasi dan upah minimum khususnya pemerintah Kota Medan.
2. Dapat menjadi masukan bagi para peneliti selanjutnya dan juga sebagai sumber informasi bagi peneliti lain yang berminat di masalah yang sama.
3. Dapat memberikan sumbangan materi bagi mahasiswa/i ekonomi khususnya Departemen Ekonomi Pembangunan.
4. Sebagai pembelajaran dan menambah pengetahuan serta wawasan mengenai PDRB, investasi, upah minimum dan penyerapan tenaga kerja.